

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018-2022**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)*

*Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



**Oleh :**

**E L S A**  
**20133027**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2023**



**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018-2022**

Nama : ELSA  
NIM : 20133027  
Program Studi : Akuntansi (DIII)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Oktober 2023

Diketahui Oleh

Ketua Prodi



Mayar Afriyenti, SE, M.Sc  
NIP. 198401132009122005

Disetujui Oleh

Pembimbing Tugas Akhir



Mayar Afriyenti, SE, M.Sc  
NIP. 198401132009122005



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR




### ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 – 2022

Nama : Elsa  
Nim : 20133027  
Program Studi : Akuntansi (DII)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program  
Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri  
Padang

Padang, Maret 2024

#### Tim Penguji

	Nama		Tanda Tangan
1.	Mayar Afriyenti, SE, M.Sc	(Ketua)	 _____
2.	Vanica Serly, SE, M.Si	(Anggota)	 _____
3.	Vita Fitria Sari, SE, M.Si	(Anggota)	 _____



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elsa  
Thn. Masuk/NIM : 2020/20133027  
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 27 Maret 2002  
Program Studi : Akuntansi (DIII)  
Keahlian : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Alamat : Jl. Cendrawasih Gang Elang II No. 1, Air Tawar Barat,  
Padang Utara  
Judul Tugas Akhir : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi  
Sumatera Barat Tahun 2018-2022

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Maret 2024  
Yang menyatakan



Elsa  
NIM. 20133027

## ABSTRAK

**Elsa** : **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022**

**Pembimbing** : **Mayar Afriyenti, SE, M.Sc**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat khususnya untuk tahun 2018 sampai dengan 2022 dan kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah studi pustaka, dokumen-dokumen berupa Laporan Realisasi Anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa (1) pendapatan daerah mengalami fluktuatif. (2) varian pendapatan dikategorikan dalam *unfavourable*. (3) efektivitas dikategorikan sangat efektif. (4) desentralisasi dikategorikan cukup. (5) rasio ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi. (6) rasio kemandirian keuangan daerah dikategorikan sedang dengan pola *partisipatif*. (7) pertumbuhan belanja mengalami fluktuatif. (8) efisiensi daerah dikategorikan kurang efisien (9) belanja operasi mengalami fluktuatif. (10) belanja modal yang mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun.

**Kata kunci:** kinerja keuangan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pengelolaan keuangan daerah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas segala berkah, rahmat, hidayah, serta pertolongan yang diberikan-Nya kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan judul : **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022”** tepat pada waktunya, serta shalawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan akhlakulkarimah bagi seluruh penjuru dunia. Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Diploma III Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padang.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis sudah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta dukungan dalam bentuk apapun dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis dengan senang hati mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Teristimewa kepada orang tua tercinta , Ayahanda Jen Junaidi, Ibunda Jumrah, dan adek Nicky yang telah memberikan kesungguhan do'a, bantuan moral, suport maupun materi kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

2. Ibuk Mayar Afriyenti, SE,M.Sc selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing dengan sabar dan berbagi ilmu dari awal penulisan TA dibuat hingga TA ini selesai.
3. Ibuk Herlina Helmy, SE,Akt.,M.S.Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing peneliti selama perkuliahan.
4. Bapak Dr. Idris M.si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
5. Bapak / Ibuk dosen serta staff pengajar dan karyawan program studi DIII FE UNP yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Sahabat tercinta Dhea dan Fadila yang selalu ada saat senang dan sedih yang telah berjuang bersama hingga sekarang dan tidak pernah bosan dalam memberikan dukungan, perhatian, dan memberikan terbaik bagi kelancaran tugas akhir penulis.
7. Kepada partner jalannya Tugas akhir Ailin dan Delvi, yang selalu ada berjuang bersama-sama dalam mengerjakan tugas akhir dengan penulis dan yang tidak pernah bosan untuk mengingatkan dan memberikan semangat satu sama lain. Serta teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini dan tak pernah memutuskan untuk menyerah

sesulit apapun proses penyusunan tugas akhir ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa untuk mewujudkan harapan orang tua yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Semoga segala bimbingan, bantuan, dan dorongan yang telah diberikan menjadi kebaikan dan diridhoi oleh Allah SWT. Penulis telah menyelesaikan tugas akhir ini dengan seluruh kemampuan, namun penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk ini penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian dari semua pihak penulis ucapkan terimakasih.

Padang, 16 Oktober 2023

ELSA



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR TABEL .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Otonomi Daerah .....	8
B. Keuangan Daerah .....	9
C. Laporan Keuangan .....	16
D. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	23
1. Analisis Pertumbuhan Pendapatan .....	25
2. Analisis Varians Pendapatan .....	26
3. Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan .....	27
4. Analisis Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah .....	28
5. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah .....	29
6. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah .....	29
7. Analisis Pertumbuhan Belanja .....	31
8. Analisis Rasio Efisiensi Belanja .....	32
9. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja .....	33
10. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja .....	34
BAB III METODE PENELITIAN .....	37
A. Bentuk Penelitian Tugas Akhir .....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	37
1. Lokasi Penelitian .....	37
2. Waktu Penelitian .....	37

C.	Rancangan Penelitian.....	38
1.	Jenis Penelitian.....	38
2.	Tahapan Penelitian.....	38
3.	Objek Penelitian.....	39
4.	Sumber Data Penelitian.....	40
5.	Teknik Analisis Data.....	40
a.	Analisis Pertumbuhan Pendapatan.....	41
b.	Analisis Varians Pendapatan.....	41
c.	Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan.....	42
d.	Analisis Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah .....	43
e.	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah .....	44
f.	Rasio Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan Daerah .....	45
g.	Analisis Pertumbuhan Belanja.....	46
h.	Analisis Rasio Efisiensi Belanja .....	47
i.	Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja .....	48
j.	Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja .....	48
BAB IV	PEMBAHASAN.....	50
A.	Gambaran Umum Instansi .....	50
1.	Provinsi Sumatera Barat .....	50
2.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat.....	51
B.	Temuan dan Pembahasan.....	54
1.	Rasio Pertumbuhan Pendapatan.....	54
2.	Rasio Varians Pendapatan.....	56
3.	Rasio Efektivitas Pendapatan.....	57
4.	Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah.....	59
5.	Rasio Ketergantungan Keuangan daerah .....	60
6.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	62
7.	Rasio Pertumbuhan Belanja.....	63
8.	Analisis Efisiensi Keuangan daerah (REKD) .....	65
9.	Belanja Oerasi terhadap Total Belanja .....	66



10. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah.....	67
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	72
LAMPIRAN.....	74

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Struktur BPKAD Provinsi Sumatera Barat .....	52
---	----



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.0.1 Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022.....	3
Tabel 1.0.2 Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022.....	4
Tabel 2.0.1 Kriteria Efektivitas Pendapatan Keuangan Daerah.....	27
Tabel 2.0.2 Kriteria penilaian tingkat derajat desentralisasi .....	28
Tabel 2.0.3 Kriteria Penilaian Resiko Ketergantungan Keuangan Daerah .....	29
Tabel 2.0.4 Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah.....	30
Tabel 2.0.5 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah .....	33
Tabel 3.0.1 Kriteria Efektivitas Pendapatan Keuangan Daerah.....	43
Tabel 3.0.0.2 Kriteria penilaian tingkat Derajat Desentralisasi .....	44
Tabel 3.0.3 Kriteria Penilaian Resiko Ketergantungan Keuangan Daerah .....	44
Tabel 3.0.4 Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah.....	45
Tabel 3.0.5 Kriteria penilaian Efisiensi Keuangan Daerah.....	48
Tabel 4.0.1 Perhitungan dari rasio Varians Pendapatan pada Provinsi Sumatera Barat .....	55
Tabel 4.0.2 Perhitungan dari rasio Varians Pendapatan pada Provinsi Sumatera Barat .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4.0.3 Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan pada Provinsi Sumatera Barat .....	58
Tabel 4.0.4 Perhitungan rasio derjat desentralisasi keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat.....	59
Tabel 4.0.5 Perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat .....	60
Tabel 4.0.6 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Provinsi Sumatera Barat	63
Tabel 4.0.7 Perhitungan rasio pertumbuhan belanja pemerintah Provinsi Sumatera Barat .....	64
Tabel 4.0.8 Perhitungan rasio efisiensi keuangan Provinsi Sumatera Barat.....	65

Tabel 4.0.9 Perhitungan rasio belanja operasi terhadap total belanja Provinsi Sumatera Barat.....	66
Tabel 4.10 Perhitungan rasio belanja modal terhadap total belanja pada provinsi Sumatera Barat.....	67



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan otonomi daerah adalah hak kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat (Sasana, 2011). Menurut Handayani (2009) otonomi membawa dua implikasi khusus bagi pemerintah daerah yaitu semakin meningkat biaya ekonomi (*high cost economy*) dan efisiensi efektivitas. Jadi dapat dilihat bahwa pelaksanaan desentralisasi fisik membutuhkan dana yang memadai khususnya bagi implementasi di level daerah (Rondinelli,1989).

Keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah merupakan hal yang lebih penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat bukan hanya pelimpahan kewenangan dan pembiayaan saja dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Tujuan pemberian kewenangan yang lebih luas dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah adalah untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah daerah mulai dari perencanaan potensi sumber daya yang

dimiliki dalam rangka membangun, mengelola, mengendalikan, dan mengevaluasi segala sumber daya dalam rangka mendorong pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan semua daerahnya.

Pemberian otonomi daerah merupakan upaya pemerintah untuk mendorong kreativitas, inovasi, dan kemandirian yang diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah di Indonesia sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungannya pada pemerintah pusat. Pemberian hak otonom kepada daerah, pemerintah pusat mengharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Otonomi daerah menuntut daerah untuk mencari alternatif sumber pendanaan sendiri tanpa bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Otonomi daerah membutuhkan partisipasi masyarakat, investasi swasta, perusahaan milik daerah, dan pemerintah daerah itu sendiri sebagai pemacu keberhasilan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.

Permendagri Nomor 13 tahun 2006 menyebutkan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dani Melmambessy (2022) menyebutkan, keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem



yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahunnya ditetapkan dengan peraturan daerah (PP 58 Tahun 2005, Pasal 4).

Sularso & Restianti (2011) menyebutkan salah satu cara menilai kinerja pemerintah adalah dengan melakukan analisis terhadap kinerja keuangan yang telah dikelola oleh pemerintah itu sendiri. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan daerah tersebut. Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga kemampuan keuangan daerah yang memadai. Sehingga, suatu daerah yang kinerja keuangannya baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerahnya.

Perekonomian Provinsi Sumatera Barat masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, jasa, industri pengolahan, serta pariwisata. Dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh beberapa sektor tersebut, Provinsi Sumatera Barat mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan dan dapat meningkatkan perekonomiannya.

**Tabel 1.0.1 Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022**

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan
2018	6.464.256.196.560,00	6.292.287.631.025,90
2019	6.607.002.065.730,00	6.390.337.204.584,19
2020	6.421.814.751.626,00	6.364.065.756.244,41
2021	6.652.314.674.092,00	6.707.043.831.745,89
2022	6.175.628.018.183,00	6.130.023.203.347,60

**Tabel 1.0.2 Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022**

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
2018	5.883.475.884.676,77	5.462.759.063.270,09
2019	6.050.552.689.181,72	5.840.332.375.438,32
2020	5.964.110.587.546,59	5.642,976.228.598,93
2021	6.898.114.698.298,00	6.468.906.658.345,37
2022	6.639.308.547.776,00	6.304.434.742.047,81

Berdasarkan tabel diatas menyajikan fluktuasi realisasi pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2022. Dalam 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, Namun belum sepenuhnya menggambarkan bagaimana kinerja keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2018-2022. Berdasarkan informasi dari Laporan Realisasi Anggaran maka dapat dilakukan analisis kinerja keuangan guna untuk mengevaluasi apakah telah menggunakan APBD secara ekonomis, karena untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah salah satunya diukur melalui kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk akuntabilitas dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar menunjukkan bagaimana uang dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan *output* yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan



dengan pemilihan juga penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas.

Setiap pemerintah daerah kabupaten/kota atau provinsi mempunyai laporan keuangan untuk dapat melihat atau mengetahui kondisi keuangan suatu pemerintah daerah setiap tahunnya. Analisis laporan keuangan pada dasarnya merupakan analisis yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Tidak hanya menggambarkan kinerja dengan nilai saja tetapi dapat dilihat juga dari persentase perbandingan tingkat rasio yang dianalisis.

Kinerja pemerintah daerah/provinsi dapat dilihat dengan melakukan perbandingan persentase, dengan perbandingan persentase tersebut uraian yang dapat dikaji yaitu; (1) Apakah pemerintah provinsi Sumatera Barat memiliki kinerja keuangan yang bagus ataupun sebaliknya, (2) Apakah pemerintah berhasil memaksimalkan serta meningkatkan pendapatan asli daerah, (3) Apakah pemerintah provinsi Sumatera Barat mampu membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri. Oleh karena itu, penulis merasa perlu melakukan analisis keuangan daerah pada pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2018 – 2022. Analisis tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain : analisis pertumbuhan pendapatan, analisis varians pendapatan, analisis rasio efektivitas pendapatan, analisis derajat desentralisasi, analisis rasio ketergantungan keuangan daerah, analisis rasio kemandirian keuangan daerah, analisis pertumbuhan belanja, analisis rasio efisiensi belanja,

analisis belanja operasi terhadap total belanja, analisis belanja modal terhadap total belanja.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti ingin mengetahui kinerja keuangan daerah provinsi Sumatera Barat lebih komprehensif berdasarkan rasio keuangan daerah. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 – 2022**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian adalah “Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022”.

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 – 2022. Serta memaparkannya dengan jelas dan ringkas agar mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti ini, peneliti megarapkan agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti, pemerintah daerah, dan pihak lain yang membaca hasil penelitian ini. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

### 1. Bagi Peneliti

Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang analisis kinerja keuangan pada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat, serta untuk merealisasikan teori yang didapat dari studi kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya.

### 2. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai tambahan bahan referensi dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah, agar nantinya pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber pendapatan sumber Pendapatan Asli Daerah dan sebagai alternatif masukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah terutama provinsi Sumatera Barat secara ekonomis, efisien, dan efektif demi tercapainya keberhasilan otonomi daerah.

### 3. Bagi Akademis

Sebagai bahan yang berguna dalam menambah pengetahuan dan referensi bagi penelitian yang akan melakukan penelitian dimasa yang akan datang, khususnya yang berminat dengan pembahasan mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Otonomi Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Karianga (2017;2). Kekuasaan dan kewenangan pemerintahan yang diserahkan ke daerah, salah satunya adalah untuk mengelola APBD yang mencakup: (1) mengelola dana transfer; (2) mengelola fisik daerah melalui pungutan pajak daerah dan retribusi; dan (3) mengelola lain-lain penerimaan yang sah sebagai sumber PAD.

Menurut Halim (2001) ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah sebagai berikut:

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar. Dengan demikian, peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.